

PENGUATAN DISTRIBUSI PANGAN DALAM MENGANTISIPASI GEJOLAK HARGA BERAS NASIONAL

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Memasuki paruh kedua tahun 2025, stabilitas harga dan pasokan beras nasional masih menghadapi tantangan serius. Harga beras, terutama kualitas premium, menunjukkan tren kenaikan di berbagai daerah, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Di Riau, misalnya, harga beras premium naik 8,16% di atas HET. Kenaikan harga ini terjadi meskipun pemerintah, melalui BULOG terus berupaya melakukan intervensi pasar. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi instrumen utama, di mana BULOG secara masif menggelontorkan beras ke seluruh wilayah untuk meredam gejolak harga. Namun demikian, Kenaikan harga ini memberikan tekanan signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan rentan, serta berpotensi mendorong laju inflasi komponen bahan makanan yang dapat merambat ke sektor lainnya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah efektivitas dan kecepatan distribusi. Penyaluran beras SPHP yang ditargetkan sebesar 1,3 juta ton hingga akhir tahun 2025 masih jauh dari realisasi. Kesenjangan antara target dan realisasi ini mengindikasikan adanya kendala sistemik dalam rantai distribusi dari gudang BULOG hingga ke konsumen. Ombudsman RI bahkan menyoroti pentingnya percepatan pelepasan stok beras BULOG untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan konsumen. Situasi ini menciptakan paradoks: stok beras di gudang melimpah, tetapi masyarakat di beberapa daerah menghadapi kelangkaan dan harga tinggi. Kasus di Kepulauan Meranti, yang merupakan wilayah kepulauan, menjadi contoh nyata di mana kelangkaan pasokan memaksa BULOG mengirimkan bantuan beras secara khusus. Hal ini menggarisbawahi tantangan logistik yang kompleks, terutama dalam menjangkau daerah-daerah non-sentra produksi yang rentan terhadap gangguan pasokan. Lambatnya distribusi ini menimbulkan kekhawatiran ganda, yaitu kerawanan pangan lokal di satu sisi, dan risiko kerugian ekonomi bagi BULOG sendiri, sebab stok beras yang menumpuk terlalu lama di gudang berpotensi mengalami penurunan mutu, bahkan kerusakan.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi penyaluran beras SPHP dan bantuan sosial pangan untuk menekan harga. Hingga 14 Agustus 2025, realisasi bantuan pangan telah mencapai lebih dari 90%. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) relatif lebih efektif dibandingkan SPHP yang berbasis operasi pasar. Perbedaan efektivitas ini patut menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki mekanisme SPHP agar lebih responsif terhadap dinamika pasar. Langkah intervensi tersebut, ditambah dengan masuknya musim panen di beberapa sentra produksi, dilaporkan mulai menunjukkan dampak positif berupa tren penurunan harga di beberapa wilayah.

Namun, fenomena kenaikan harga di tengah stok yang seharusnya mencukupi menandakan adanya potensi masalah struktural dalam rantai pasok. Jalur distribusi yang panjang dan tidak efisien membuka celah bagi praktik penimbunan atau spekulasi yang bisa berdampak terhadap gejolak harga.

Ketika distribusi resmi dari BULOG tersendat, pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab dapat mengendalikan pasokan di tingkat lokal untuk menaikkan harga secara artifisial. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat sementara seperti operasi pasar, tetapi juga menyentuh perbaikan struktural pada tata kelola rantai pasok beras nasional. Pengawasan yang ketat terhadap jalur distribusi, penegakan hukum terhadap spekulasi, serta perbaikan sistem logistik BULOG menjadi agenda mendesak yang harus segera ditangani untuk mencapai stabilitas harga pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi produsen maupun konsumen.

Atensi DPR

Melihat dinamika kenaikan harga beras yang masih terjadi di berbagai wilayah, Komisi VI DPR RI perlu secara signifikan meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap kinerja BULOG serta efektivitas kebijakan stabilisasi pemerintah. Fokus pengawasan harus diarahkan pada evaluasi menyeluruh atas model bisnis dan operasional distribusi BULOG, dengan mendorong keterlibatan aktif Kementerian BUMN dalam perbaikan manajemen. Langkah ini krusial untuk memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga tepat sasaran dan responsif terhadap gejolak harga di setiap daerah. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu proaktif mengawal sinergi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan BULOG agar kebijakan dari hulu hingga hilir berjalan efektif dan terintegrasi. Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI harus mendorong adanya investigasi mendalam mengenai potensi praktik penimbunan atau praktik spekulasi yang dapat memberikan dampak terhadap situasi pasar dan mendorong upaya stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Sumber

antaranews.com, 14 Agustus 2025;
bisnis.com, 15 Agustus 2025;
Kompas, 15 Agustus 2025.

Minggu ke-2 Agustus
(11 s.d. 17 Agustus 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*